

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara Indonesia, lebih dari tiga per-empat penduduknya tinggal di wilayah pedesaan sehingga pembangunan nasional desa mempunyai peran penting. Dengan demikian, desa dapat memberikan efek yang relative besar terhadap upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Menjadi bagian dari kabupaten, desa mempunyai otonomi asli. Otonomi tersebut menyampaikan kewenangan desa dalam mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. Berdasarkan pada UU No 9 Tahun 2015 menjelaskan untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal, daerah diberi kesempatan mengoptimalkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, serta kreativitas mereka. Pencapaian ini mampu mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut menjadi kesempatan yang baik dalam perbaikan pemugaran yang berkualitas di pedesaan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa disebut sebagai upaya meningkatkan ketahanan desa dengan memberdayakan warga serta memanfaatkan potensi mereka (Aeni, 2020). Adapun upaya pemerintah meningkatkan kecepatan pembangunan ialah dengan kebijakan dana desa yang digunakan pada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Secara umum, dana desa dipergunakan dalam pengaplikasian pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa, pelatihan, serta memberdayakan masyarakat (Atmojo dkk., 2017). Efektivitas

pengelolaan dana desa dapat tercapai dengan baik jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa.

Untuk mengelola aset, layanan, dan unit usaha lainnya, badan usaha milik desa (BUMDesa) dimiliki secara keseluruhan mayoritas oleh desa melewati pernyataan eksklusif yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan (Sutoro dkk., 2014). Tujuan dari didirikannya BUMDesa ialah guna menaikkan kemampuan pemerintah desa pada pelaksanaan pemerintahan serta membantu dalam mengembangkan pendapatan masyarakat melalui upaya ekonomi penduduk pedesaan (Mutolib dkk., 2019). BUMDesa juga didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat yang menganut pada beberapa prinsip seperti prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel serta berkelanjutan (Madjodjo & Dahlan, 2020). Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip, membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai demi mengelola dana desa hingga menjadi sebuah produk/hasil yang menguntungkan bagi BUMDesa sendiri sehingga pada tahun berikutnya BUMDesa tidak memerlukan lagi dana desa karena keuntungan yang didapat sudah mencukupi. Karena pada umumnya permasalahan dalam pembangunan pedesaan ialah kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah sehingga hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pembangunan yang terjadi pada suatu desa.

Dalam menyelenggarakan suatu BUMDesa tentu tidak luput dari aktivitas keuangan dan yang paling penting ialah kinerja keuangan dari BUMDesa tersebut. Keberhasilan dalam mencapai tujuan BUMDesa tentu dapat dilihat dari segi kinerja keuangannya. Apabila manajemen pengelolaan

keuangannya dapat dinilai benar maka BUMDesa tersebut akan dengan mudah memahami bagaimana jalannya keuangan yang tercatat secara rinci dan tersusun. Menurut Salim et al (2018), Kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang keadaan keuangan suatu perusahaan selama suatu periode yang berkaitan dengan pengumpulan serta penyaluran dana dengan mengacu pada faktor-faktor yang dapat Memengaruhi, seperti kecukupan modal, profitabilitas dan likuiditas. Ini memungkinkan untuk menentukan keadaan keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan prestasi kerjanya selama periode tersebut. Untuk menghadapi perubahan lingkungan, sumber daya harus digunakan seoptimal mungkin, yang menjadikannya penting untuk dilakukan.

Menurut Sofyani et al (2019), menyebutkan bahwasanya penelitian mengenai BUMDesa masih sangat jarang ditemukan terutama dari segi manajerial dan kinerjanya. Sehingga membuat hal ini perlu untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang memungkinkan suatu BUMDesa berhasil dalam kinerjanya. Karena pada realitanya di lapangan masih banyak ditemukan BUMDesa berbadan hukum yang hanya beroperasi untuk jangka pendek. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk mengisi kekurangan mengenai kajian tentang BUMDesa yang berfokus pada kinerja keuangan BUMDesa.

Suatu wujud nyata, pembangunan ekonomi ialah berdirinya BUMDesa pada masing-masing desa yang berada di empat kabupaten Madura. Salah satunya kabupaten Pamekasan yang terletak di Pulau Madura. Melalui hasil wawancara oleh peneliti kepada salah satu Tenaga Ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terdapat 30 BUMDesa yang

aktif beroperasi diantaranya Bunder, Panempan, Tanjung, Padelegan, Murtajih, Blumbungan, Ponteh, Kertagenah Dajah, Kertagenah Tengah, Toronan, Branta Pesisir, Rekkerrek, Laden, Pademawu Barat, Pademawu Timur, Prekbun, Tambung, Waru Barat, Sotabar, Batukerbuy, Tobungan, Lembung, Pagendingan, Konang, Montok, Gagah, Sumedangan, Tampojung Pregghi, Bicolorong, dan Waru Timur. Miftahol Rachman, salah satu penggerak Swadaya Masyarakat Muda DPMD, mengatakan bahwa mereka telah melakukan pendampingan terhadap BUMDesa yang belum berbadan hukum dan berstatus belum maju. Menurutnya, politik pemilihan kepala desa masih menjadi penghalang utama bagi kemajuan BUMDesa di beberapa desa. BUMDesa, dikarenakan pada pengurus BUMDesa akan terus berganti dengan yang baru (*mediajatim.com*). Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang menjadi kendala dalam berkembangnya BUMDesa, yakni rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa sehingga banyak desa yang memiliki niat untuk membangun BUMDesa, akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaannya. Sulitnya mencari potensi desa juga menjadi kendala dalam terbentuknya suatu BUMDesa walaupun di setiap desa telah disiapkan keuangan yang cukup untuk pengembangan desanya hanya tinggal pemerintahan desa untuk mengelola keuangan secara baik demi berkembang dan meningkatnya perekonomian masyarakat (*redaksiportalmadura*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menggunakan teori keagenan dari Jensen & Meckling (1976), mendefinisikan teori keagenan adanya kesinambungan atau koneksi antara *principal* dan *agent*. *Principal* mengacu pada pemilik perusahaan dan berhak mengeluarkan perintah

kepada agen. Agen mengacu pada orang yang menerima perintah prinsipal dan mengelola perusahaan berdasarkan prinsip pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung risiko, pemisahan kepemilikan, kontrol perusahaan, manajer, dan pengambilan keputusan serta kontrol fungsional. Masalah muncul ketika manajemen harus menjalankan aktivitasnya atas perintah prinsipalnya. Meskipun demikian, manajer biasanya memiliki tujuan pribadi untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. Ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, menyebabkan muncul masalah keagenan.

Selain teori agensi, terdapat teori legitimasi yang mendukung penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Andreas (2011) dimana teori legitimasi tersebut menjelaskan bahwasanya adanya suatu instansi di suatu daerah karena dukungan politik yang dijamin oleh peraturan pemerintah, merupakan nilai positif dari sudut pandang sosial. Dengan demikian, secara tidak langsung terdapat kontrak sosial antara lembaga dan masyarakat, dalam kaitannya dengan itu masyarakat memberikan biaya dan manfaat yang kondusif bagi perkembangan organisasi secara berkelanjutan.

Pendapat lain mengenai teori legitimasi yang dikemukakan oleh O'Donovan (2000) dalam Hadi (2011) merupakan suatu pemberian dari masyarakat untuk instansi serta hal yang diharapkan dari masyarakat. Maka dari itu adapun manfaat legitimasi ialah hal yang dijadikan instansi dalam menjaga keberlangsungan hidup instansinya.

Dalam mewujudkan kinerja keuangan yang baik perlu adanya faktor pendukung atas hal tersebut. Kemampuan seseorang untuk memahami dan

memahami akuntansi disebut pemahaman akuntansi. Kemampuan seseorang untuk memahami proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan, dan interpretasi transaksi keuangan dapat diukur (Taufiqurrohman et al., 2021). Menurut Mahmudi (2010), definisi tentang pemahaman akuntansi mengacu pada seberapa jauh akuntansi dipahami atau dipahami dengan baik sebagai kumpulan pengetahuan dan kemampuan untuk memproses pencatatan transaksi hingga laporan keuangan. peneliti menyimpulkan pemahaman akuntansi ialah seberapa baik seseorang benar-benar memahami akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penginterpretasian keuangan yang bermanfaat.

Tingkat pendidikan juga melatarbelakangi keberhasilan suatu BUMDesa. BUMDesa Pengurus/pengelola BUMDesa yang berpendidikan tinggi mampu memajukan BUMDesa dengan baik, tetapi bukan berarti pengurus/pengelola BUMDesa yang berpendidikan rendah tidak dapat meningkat, hanya membuat kemajuan lebih lambat. BUMDesa mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang berpendidikan tinggi untuk mengelola BUMDesa (Posi & Putra, 2021).

Adapun Faktor lain yang Memengaruhi kinerja keuangan BUMDesa adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut (Uno & Lamatenggo, 2010), teknologi informasi ialah kombinasi teknologi komputer dengan teknologi komunikasi dengan tujuan mengolah data. Pengolahan data mencakup pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan manipulasi data secara menyeluruh untuk mendapatkan data berkualitas tinggi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memberikan informasi relevan, akurat, serta tepat

waktu untuk memenuhi kebutuhan individu, perusahaan, pemerintah serta untuk mengambil keputusan secara tepat. Penggunaan teknologi informasi mampu mempersingkat waktu pengolahan serta penyampaian data transaksi sampai laporan keuangan dan mencegah kesalahan saat memposting buku besar, dokumen, dan jurnal ke dalam laporan keuangan.

Penelitian terdahulu oleh Saputra (2021), menyatakan hasil bahwasanya BUMDesa Dile tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang diantaranya yakni apabila kapasitas sumber daya manusia tidak memadai dalam mengelola menyebabkan banyak masalah internal yang timbul, termasuk SK pengurus belum dibuat. Akibatnya, pengurus tidak mendapatkan legitimasi masyarakat termasuk pelaporan tentang pelaksanaan program dari tahun 2018 hingga saat ini belum diterbitkan serta tidak ada pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pengurus.

Penelitian Syahril et al (2019) melakukan penelitian di kecamatan Batuan kabupaten Sumenep. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa kendala pada BUMDesa kecamatan Batuan kabupaten Sumenep seperti permodalan, kurangnya informasi tentang pemerintah daerah dan kurangnya honor kepada pegawai BUMDesa. Faktor lain yang Memengaruhi kinerja keuangan BUMDesa yaitu permodalan, tanggung jawab, pendidikan masyarakat, kepercayaan, dan jenis usaha.

Studi ini memiliki *novelty* atau pembaharuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. *Novelty* tersebut terletak pada pengambilan objek yang mana penelitian terdahulu hanya menggunakan objek di tingkat kecamatan

sedangkan dalam studi ini mengambil objek pada tingkat kabupaten. Artinya, adanya perluasan mengenai pengambilan objek dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Saat ini, topik tentang kinerja keuangan BUMDesa sering kali menjadi perbincangan setiap badan usaha. Hal tersebut dikarenakan kinerja keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan di setiap usaha termasuk pada BUMDesa hingga kadang menjadi acuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan dengan memperhatikan aktivitas keuangan selama periode tertentu.

Alasan peneliti mengambil objek di kabupaten Pamekasan ialah pertama, dikarenakan dari 520 kabupaten/kota di Indonesia, Pamekasan tembus di 10 besar kabupaten terinovatif dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA) bahkan masuk kabupaten terinovatif di Jawa Timur. Hal tersebut terjadi tentu adanya kerja keras serta dukungan dari semua masyarakat termasuk campur tangan pihak BUMDesa yang ada di kabupaten Pamekasan (pamekasankab.go.id). Berdasarkan uraian diatas bahwa keberadaan BUMDesa memiliki pengaruh yang cukup tinggi bagi keberlangsungan masyarakatnya karena dapat mendorong perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Suksesnya suatu BUMDesa tentu karena adanya kerjasama yang baik dalam kepengurusannya baik dari segi kinerja pengurus BUMDesa dan yang paling utama ialah dapat dilihat dari segi kinerja keuangannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik meneliti tentang **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan”**

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah pemahaman sistem akuntansi dapat memengaruhi kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan?
- Apakah tingkat pendidikan dapat memengaruhi kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan?
- Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menguji pemahaman sistem akuntansi dapat memengaruhi kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan.
- Untuk mengetahui dan menguji tingkat pendidikan dapat memengaruhi kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan.
- Untuk mengetahui dan menguji pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi ini mampu berkontribusi pada kemajuan ilmu perekonomian yang berhubungan dengan kinerja keuangan di pedesaan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil studi diharapkan mampu menambah pengalaman, wawasan serta pengetahuan bagi peneliti tentang faktor-faktor kinerja keuangan pada BUMDesa.

2) Bagi Ilmu pengetahuan

Hasil studi ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa ataupun akademisi dalam melakukan penelitian yang serupa atau menambah terhadap topik yang dibahas.

3) Bagi BUMDesa

Studi ini diharapkan dapat membantu dalam pembuatan berbagai kebijakan untuk penyelenggaraan BUMDesa, terutama yang berkaitan dengan faktor lain yang Memengaruhi kinerja keuangan BUMDesa.